

## Gubernur Jateng Sidak Harga Beras dan Migor

**SEMARANG (KR)** - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pasar tradisional di Semarang, untuk mengecek harga serta stok komoditas beras dan minyak goreng (migor). Dari semua pasar tradisional yang ia datangi, Ganjar hampir tidak dapat menemukan stok minyak subsidi, Minyakita.

Demikian diungkapkan Gubernur Ganjar Pranowo kepada wartawan usai Sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang Jumat (10/2). Sambil olahraga sepeda pagi, Ganjar mendatangi lima pasar di Kota Semarang, yaitu Pasar Wonodri, Peterongan, Pasar Langgar, Pasar Dargo, dan Pasar Johar Kanjengan. Di setiap pasar, Ganjar menyapa dan berbincang dengan sejumlah pedagang. Kepada Gubernur, para pedagang pasar mengatakan bahwa stok beras dan minyak goreng secara umum aman.

Kepada Ganjar, para pedagang mengatakan harga beras dan minyak goreng naik. Harga minyak yang semula di kisaran Rp15.000/liter, kini naik menjadi Rp 16.500/liter. Beberapa pedagang di pasar mengaku minyak goreng subsidi sudah lama tidak ada. "Kalau Minyakita sudah lama nggak ada pak. Adanya ya yang kemasan sama curah," ujar Darno, pedagang sembako di Pasar Langgar.

Di Pasar Dargo, Ganjar mendatangi penjual beras. Menurut sang penjual, harga beras mengalami kenaikan signifikan dalam sebulan terakhir. "Saya ini stoknya nggak banyak pak. Biasanya paling sepuluh sak. Naik terus harganya, kadang Rp 100, kadang Rp 200. Ya kalau saya kan maunya nggak naik," ujar Parman penjual beras di Jalan Dargo.

Ganjar Pranowo mengatakan, pengecekan seperti ini penting dilakukan. Selain memantau stok, Ganjar juga berupaya menghimpun informasi tentang kenaikan harga di dua komoditas yang jadi faktor inflasi tersebut. "Ini lagi kami coba untuk dikonsolidasikan, untuk ngecek kenapa beberapa harga pangan kita naik, wabil khusus untuk beras dan minyak goreng," kata Ganjar di Pasar Johar Kanjengan.

Mantan anggota DPR RI itu menyebut, ada banyak faktor disampaikan pedagang yang menyebabkan harga beras naik. Di antaranya banjir dan serangan hama. Saat dilakukan pengecekan di beberapa tempat, alasannya sama. Untuk itu Pemprov Jawa Tengah akan melakukan kontrol kepada hasil panen termasuk para pedagang. (Bdi)-f



KR-Budiono

**Ganjar Pranowo sidak di pasar tradisional di Kota Semarang, untuk mengecek stok dan harga beras dan minyak goreng.**

## DIHARAPKAN BISA TINGKATKAN KINERJA Pembangunan Mako Polres Magelang Kota

**MAGELANG (KR)** - Peletakan batu pertama pembangunan gedung Mako Polresta Magelang Kota dilakukan secara bergantian oleh Aslog Kapolri Irjen Pol R Prabowo Argo Yuwono SIK MSI, Waka Polda Jateng Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji SIK dan Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda E Sebayang SIK MM di halaman Apartemen Musvia Polres Magelang Kota, Jumat (10/2).

Kapolres Magelang Kota berharap proses pembangunan dapat berlangsung baik dan lancar. Dengan dibangunnya Mako Polres Magelang Kota yang baru ini tentunya berdampak positif bagi semua pihak. Dengan adanya Mako yang baru ini, nanti Polres Magelang Kota dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Magelang, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta dalam penegakan hukum untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif.

Dengan adanya pembangunan mako yang baru ini, berarti seluruh personel Polres Magelang Kota akan mendapatkan 'rumah baru', sehingga anggota juga akan lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya dan dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Diperoleh informasi, di Tahun 2023 ini Mako Polres Magelang Kota mendapatkan pembangunan berupa gedung bertipe 3.600 m2, tiga lantai dengan 1 unit, anggarannya sekitar Rp 22,9 miliar dengan masa pelaksanaan fisik 180 kalender.

Rencana pembangunan terdiri Mako Polres Magelang Kota 3 lantai seluas 3.600 M2, Pos Jaga Keamanan dan Pemeriksaan, musala, pagar depan Polres Magelang Kota, pagar gedung Mako Polres Magelang Kota, parkir mobil, parkir sepeda motor. Kapasitas ruang Mako terdiri dari lantai 1 sebanyak 117 anggota dengan jumlah ruangan sebanyak 46 bagian, lantai 2 sebanyak 129 anggota dengan jumlah ruangan 40, lantai 3 sebanyak 36 anggota dengan ruangan sebanyak 22 bagian.

Sementara itu Aslog Kapolri diantaranya berpesan agar proses pembangunan gedung di Polres Magelang Kota ini cepat selesai. Diharapkan kualitas bangunannya tetap bagus dan terwujud 3 lantai. Berkaitan dengan adanya bangunan heritage, Aslog Kapolri juga berharap kepada Kapolres Magelang Kota untuk mengemasnya bagaimana heritage tersebut masih terjaga bagus. (Tha)-f



KR-Thoha

**Aslog Kapolri saat membubuhkan tanda tangannya pada batu prasasti peletakan batu pertama.**

## Tertib Berlalulintas Terima Sembako

**BOYOLALI (KR)** - Satuan Lalulintas (Satlantias) Polres Boyolali melakukan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2023. Operasi ini digelar selama 14 hari, terhitung mulai Selasa (7/2) hingga Senin (20/1).

Sebagai penghargaan atas kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat pengguna jalan khususnya pengguna motor dan mobil, Satlantias Polres Boyolali memberikan 50 paket sembako dan 100 kemasan susu sapi.

Pembagian paket sembako dan susu tersebut dilakukan pada Jumat (10/2) di berbagai titik, di antaranya di Boulevard Soekarno dan simpang Taman Pan-

dan Alas.

"Kita lihat pengguna motor sudah menggunakan helm dengan bwnar, penggunaan knalpot standart, kemudian kita berikan reward kepada para pengguna jalan. Kita berikan sekaligus kita imbau mereka untuk selalu ingat tertib berlalu lintas, dan keselamatan adalah pertama dan utama," jelas Kasat Lantas Polres Boyolali AKP M Herdi Pratama.

Ada delapan prioritas pelanggaran yang terus diawasi oleh Satlantias Polres Boyolali. Antara lain, menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara masih di bawah umur, berboncon-

gan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI atau tidak menggunakan safety belt.

Selain itu, pengendara dalam pengaruh minuman keras, pengendara melawan arus, pengendara melebihi batas kecepatan serta kendaraan over dimanasi dan muatan overload.

"Kami ingin sampaikan. Untuk selalu mengecek keselamatan diri sendiri dari mulai perlengkapan, kesiapan diri itu sangat penting karena sekali kecelakaan itu dapat menimbulkan keresahan lainnya," jelasnya.

Sejak dimulainya Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2023, pihaknya men-

dapati ada 506 pelanggaran. Pada hari pertama, Selasa (07/02/2023), ditemukan ada 224 perkara dengan rincian 167 tilang dan

57 teguran. Kemudian di hari kedua, Rabu (8/2), ada sebanyak 282 perkara dengan rincian 213 tilang dan 69 teguran. (R-3)-f



KR-Mulyawan

**AKP M Herdi Pratama membagikan susu dan paket sembako kepada pengguna jalan yang tertib.**

## Bantuan bagi Mahasiswa Asal Pegunungan Bintang

**SALATIGA (KR)** - Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi menegaskan pihaknya telah mengalokasikan bantuan sembako dan bahan makanan untuk ratusan mahasiswa asal Pegunungan Bintang, Papua yang kehabisan bekal dan makanan selama satu bulan.

Langkah itu diambil Pemkot Salatiga, apabila Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang (PB), Papua sampai rentang pertengahan bulan Februari sampai akhir Februari 2023 belum mengirimkan biaya untuk mahasiswa asal Pegunungan Bintang yang kini menempuh studi di UKSW Salatiga.

"Kami sudah alokasi bantuan kebutuhan mahasiswa UKSW asal Pegunungan Bintang, Papua selama satu bulan. Hal ini dengan catatan apabila pihak Pemkab asal mereka belum juga mengirimkan biaya ke Salatiga. Alokasi bantuan satu bulan ini juga merupakan perintah Pak Gubernur Jateng, Pak Ganjar Pranowo kepada saya. Kami siap membantu siapapun yang membutuhkan," tandas Sinoeng N Rachmadi kepada KR, Kamis (9/2).

Tetapi, Sinoeng berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, tepat janji untuk segera mengirim biaya bagi mahasiswa beasiswa di Salatiga tersebut. "Dari komunikasi yang kami lakukan, Pemkab PB dalam waktu dua pekan ke depan akan mengirim biaya bagi mahasiswa tersebut. Sekali kami sudah siapkan satu bulan penuh bantuan bahan makanan jika darurat lagi," kata Sinoeng N Rachmadi.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kealumnian Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Yafet Yosafet Wilben Rissy mengungkapkan dan membuka proses beasiswa bagi 210 mahasiswa asal Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua yang kehabisan bekal makanan dan biaya hidup di Sala-

tiga. Menurut Yafet, kerjasama ini dimulai pada Maret 2021 lalu antara Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dengan UKSW Salatiga untuk program peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Pada perjanjian waktu itu disepakati biaya kuliah di UKSW untuk 210 mahasiswa yang dikirim oleh Pemkab Pegunungan Bintang sebesar Rp 28.134.000.000. Selanjutnya, dilakukan pembayaran tahap pertama Rp 1,3 miliar dan tahap kedua Rp 3,5 miliar sehingga totalnya Rp 5 miliar. "Uang yang ditransfer kepada UKSW dari Pemkab Pegunungan Bintang dari perjanjian kerja sama ini sebesar Rp 5 miliar. Namun uang itu oleh pihak UKSW dengan bermurah hati diberikan untuk membantu kebutuhan 210 mahasiswa untuk bayar kos dan biaya hidup yang besarnya Rp 1,5 juta per bulan dikirim ke rekening mereka masing-masing. Sedangkan biaya kuliah selama ini tidak membayar," jelas Yafet.

Selanjutnya ia juga mengungkapkan pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan Pem-

kab Pegunungan Bintang, Papua untuk membicarakan biaya beasiswa bagi 210 mahasiswa ini. Dalam pembicaraan ini, Yafet mengatakan Pemkab Pegunungan Bintang akan membayar tanggungan (kewajiban) mereka kepada UKSW yang kurang sebesar Rp 23,134 miliar. "Kami masih tetap positive thinking (berpikir baik) dan semoga Pemkab Pegunungan Bintang Papua membayar beasiswa dan adik-adik mahasiswa asal Pegunungan Bintang ini bisa melanjutkan kuliah dalam waktu 4 tahun. Mereka sudah kuliah di UKSW selama dua tahun, dan UKSW sudah bermurah hati, kemampuan kami juga ada batasnya," jelas Yafet.

Diberitakan ratusan mahasiswa UKSW asal Pegunungan Bintang, Papua kehabisan bekal makanan dan tidak ada biaya hidup karena biaya dari Pemkab Pegunungan Bintang yang membiayai mereka berhenti dan belum ada kejelasan. Pemkot Salatiga memberikan bantuan sembako kepada mereka dalam waktu 10 hari ke depan terhitung mulai Selasa (7/2) lalu. (Sus)-f

## RS Cakra Husada Baksos Pemeriksaan Kesehatan

**KLATEN (KR)** - Ratusan warga Kecamatan Karangnongko, Klaten, mengikuti bakti sosial (baksos) pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis yang diselenggarakan Rumah Sakit Cakra Husada (RSCH) Klaten, Kamis (9/2). Layanan kesehatan gratis ini bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-39 RSCH.

Tim kesehatan yang langsung dipimpin Direktur Umum RSCH Klaten

Marsono, memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan fisioterapi dan pemeriksaan kesehatan umum. Warga yang datang didominasi lansia, dan mereka sangat antusias untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. "Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengobatan gratis ini RSCH menerjunkan seorang dokter dibantu perawat dan petugas obat. Layanan kesehatan gratis RSCH terus

dilaksanakan, kebetulan kali ini momentumnya HUT ke-39 dan penganalayan fisioterapi," kata Direktur Umum RSCH Klaten, Marsono.

Marsono menjelaskan, RSCH kembali mendapatkan penilaian akreditasi dari standar nasional rumah sakit (SNAR), paripurna bintang lima, dengan demikian pelayanan yang diberikan berstandar nasional.

RSCH juga telah membuka 5 klinik satelit yang tersebar di lima kecamatan. "Lima klinik ini terintegrasi dengan RSCH Klaten, kami akan terus meningkatkan layanan kesehatan sesuai dengan harapan Kementerian kesehatan RI," jelas Marsono.

Kegiatan tersebut disambut positif pemerintah Desa Logede. Kepala Desa Logede, Warsana, mengatakan jika selama ini kepedulian RSCH akan layanan kesehatan gratis terus dilaksanakan. (Sit)-f



KR-Sri Wastiti

**Warga melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis.**

## Pemilu 2024 Kesempatan Perbaiki Tata Kelola Negara

**BANJARNEGARA (KR)** - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di titik terendah sejak memasuki era reformasi. Hal itu menunjukkan, pemerintah belum maksimal dalam membangun demokrasi yang sehat dan tata kelola negara yang bersih. Transparency International Indonesia mendata, IPK Indonesia turun 4 poin menjadi 34 pada 2022. Hal itu membuat peringkat IPK Indonesia merosot dari 96 menjadi di posisi 110. Peringkat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam dan Thailand serta Timor Leste.

Ketua Institut Negeri, Sudirman Said me-

nilai, kemerosotan IPK menandakan ada masalah serius di tingkat makro penyelenggaraan negara. Menurutnya IPK hanya salah satu cermin dari tata kelola pemerintahan. "Saya melihat korupsi itu lebih dari sekadar soal penegakan hukum. Tetapi korupsi soal perilaku, nilai-nilai, kultur kekuasaan dan kesehatan demokrasi serta ada hubungan erat dengan politik keseluruhan," kata Sudirman, yang pernah nyalon dalam Pilgub Jateng 2018, Kamis (9/2).

Menurutnya, pemerintah gagal mengelola lingkungan pengendalian di tingkat makro. Dengan demikian, tata nilai, etika dan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah ne-



KR-Rini Suryati

**Sudirman Said**

gara tak berjalan dengan baik. "Ini yang sedang merosot, lingkungan pengendalian makro. Misalnya, praktik nepotisme di level paling tinggi memberikan contoh. Maka yang di level bawah akan mengikuti," ujarnya. Level paling tinggi bukan hanya pada nasional, tapi juga bisa pada level provinsi,

kabupaten dan kementerian terjadi nepotisme.

Selain soal lingkungan pengendalian makro, tata kelola pemerintahan juga masih diwarnai benturan kepentingan. Sudirman menyatakan, hal itu yang merusak demokrasi dan melanggengkan korupsi. "Conflict of interest ditunjukkan di mana-mana. Benturan kepentingan antara yang membuat regulasi dan yang mendapat manfaat regulasi. Antara kekuasaan yang harusnya menjaga kepentingan publik, tapi juga ikut menjalankan usaha di dalam kekuasaan," ucapnya.

"Alat-alat kontrol dalam tata negara mengalami penemuan. Misalnya, apakah parlemen kita

masih eksis sebagai alat kontrol? Apakah badan audit negara masih efektif sebagai alat kontrol. Apakah lembaga penegak hukum masih memiliki kewibawaan. Menurut Sudirman, praktik berne-gara semakin terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif. KPK dipreteli dari pelembaan aspek legal hingga penempatan orang-orang bermasalah pada level Pimpinan. Sementara sekelompok pekerja yang profesional dan menjaga idealisme digusur secara sistematis.

Ia menjelaskan, IPK yang merosot juga dipengaruhi perilaku yang meminggirkan etika publik para pejabat tinggi negara. (Ati)-f